

**PENGARUH GERAKAN TRANSNASIONAL *WOMEN'S MARCH* TERHADAP KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER  
DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S. Sos) dalam bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ZULFADILAH  
I72215033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JULI 2019**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfadilah  
NIM : I72215033  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : **Pengaruh Gerakan Transnasional *Women's March*  
Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di  
Indonesia Pada Tahun 2017-2018**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang menyatakan

Muhammad Zulfadilah  
NIM I72215033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zulfadilah

NIM : I72215033

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Pengaruh Gerakan Transnasional *Women’s March* Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 30 Juli 2019

Pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I


NIP: 198212302011011007

## PENGESAHAN


Skripsi oleh Muhammad Zulfadilah dengan judul: **“Pengaruh Gerakan Transnasional *Women’s March* Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Juli 2019.

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


Penguji I

  
Zaky Ismail, M.S.I  
NIP.198212302011011007


Penguji II

  
M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.  
NIP.198408232015031002

Penguji III

  
Rizki Rahmadini Nurika, S. Hub. Int., M.A.  
NIP.199003252018012001

#### Penguji IV

  
Ridha Amaliyah, S.IP, MBA  
NUP.201409001

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.  
NIP. 197402091998031002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfadilah  
NIM : 172215033  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hub. Internasional  
E-mail address : fadhil1297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pengaruh Gerakan Transnasional Women's March Terhadap  
Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2019

Penulis



( Muhammad Zulfadilah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRACT

**Muhammad Zulfadilah, 2019.** The Influence of the Women's March Transnational Movement Against Gender Equality Policy in Indonesia in 2017-2018. Thesis of International Relations Program Study Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords:** *Transnational movement, Women's March, gender equality policy*

This study discusses the influence of Women's March on gender equality policies in Indonesia in 2017-2018. Researcher used descriptive-qualitative method and used interview techniques and literature study that are relevant to this research. After conducting research, it can be seen that Women's March is a movement that began in Washington D.C. as a form of protest from most of the US community against Donald Trump for his attitude which was considered discriminatory-aggressive and deliberately ignoring human rights at that time, especially on gender issues. The amount of enthusiasm of the community in enlivening the action of Women's March at the time, made this social movement not only occurred in Washington D.C. but also occurred in several countries such as Australia, France and Indonesia. In Indonesia, Women's March occurred in 2017-2018. In this research, it shows that through the Women's March activism by conducting demonstrations, petitioning, and several other follow-up activities are able to influence gender equality policies in Indonesia in 2017-2018.

## ABSTRAK

**Kata Kunci:** Gerakan transnasional, Women's March, kebijakan kesetaraan gender

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Women's March terhadap kebijakan kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2017-2018. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa Women's March merupakan sebuah gerakan yang berawal di Washington D.C. sebagai bentuk protes dari sebagian besar masyarakat AS terhadap Donald Trump atas sikapnya yang dianggap diskriminatif-agresif dan sengaja mengabaikan hak asasi manusia pada saat itu, khususnya dalam isu gender. Besarnya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan aksi Women's March kala itu, membuat gerakan sosial ini tidak hanya terjadi di Washington D.C. saja, melainkan juga diselenggarakan hingga ke beberapa negara di benua lainnya seperti di Australia, Perancis, dan Indonesia. Di Indonesia, Women's March diselenggarakan pada tahun 2017-2018. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa melalui aktivisme Women's March dengan melakukan demonstrasi, pembuatan petisi, dan beberapa kegiatan lanjutan lainnya mampu mempengaruhi kebijakan kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2017-2018.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN</b>	
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9









# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Women's March* merupakan aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok aktivis dengan membawa isu mengenai hak-hak perempuan. Aksi protes ini berawal pada 21 Januari 2017 yang lalu di Washington D.C. Para aktivis sengaja melakukan aksi protes ini untuk menyambut pelantikan presiden baru Amerika Serikat saat itu yang ke-45, yakni Donald Trump.<sup>1</sup> Gelombang aksi protes ini diawali oleh inisiatif dari seorang perempuan asal Hawaii di akun Facebook miliknya untuk mengundang 40 orang temannya guna melakukan aksi protes atas kemenangan Donald Trump, yang kemudian undangan tersebut menghangat ke pengguna Facebook lainnya sehingga menyebabkan munculnya akun-akun lain yang bersedia untuk ikut serta dalam aksi protes tersebut. Setelah itu, mereka mulai menyatukan kekuatan dengan membuat laman Facebook resmi yaitu “*Women's March on Washington*” yang kemudian membuat ribuan perempuan lainnya di seluruh wilayah Amerika Serikat menandatangani petisi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.<sup>2</sup>

Hangatnya perkembangan isu hak-hak perempuan di Amerika Serikat kala itu tidak muncul tanpa alasan, hal ini dikarenakan adanya sikap dari Donald Trump yang dianggap diskriminatif-agresif dan sengaja

<sup>1</sup> Nurma Afrinda Prandansari, “*Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi*”, diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengabaikan hak asasi manusia, khususnya dalam isu gender sehingga membuat beberapa kelompok masyarakat merasa terpojokkan.

Aksi protes tersebut dilakukan setelah beberapa jam Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45. Dalam aksinya, aksi protes saat itu tidak hanya diwarnai oleh masyarakat biasa akan tetapi juga datang dari kalangan selebriti.<sup>3</sup> Mereka datang dalam gelombang massa yang memiliki satu tujuan yakni keinginan menyampaikan pesan kepada Donald Trump bahwa perempuan juga memiliki hak-hak yang patut mereka terima karena telah tertuang dalam hak asasi manusia. Selain isu mengenai hak-hak perempuan, dalam protesnya mereka juga turut mengangkat isu kesetaraan gender dan ras, keterjangkauan layanan kesehatan, perlindungan terhadap imigran dan komunitas LGBT, dll.

Dalam perkembangannya, aksi *Womens' March* di Washington dapat dipandang sebagai gerakan sosial (*social movement*). Hal ini dikarenakan *Women's March Washington* sesuai dengan konsep pada suatu gerakan sosial, menurut Giddens, gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mencapai suatu kepentingan bersama, di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.<sup>4</sup> Dengan demikian, *Women's March* dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial karena telah memenuhi syarat dari konsep gerakan sosial, di antaranya adalah sebagai upaya kolektif yakni

<sup>3</sup> Eva Mazriea, “*Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia*”, diakses pada 29 April 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-dunia/3686721.html>.

<sup>4</sup> Anthony Giddens, *Sociology* (Oxford: Polity Press). dalam Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: *Repertoar Gerakan Petani*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10, No. 1, Juli 2006.

Besarnya pengaruh yang diberikan dari terjadinya aksi *Women's March*, membuat gerakan sosial ini tidak hanya terjadi di Washington D.C. saja, melainkan juga terjadi di New York, Chicago, hingga menjar

<sup>6</sup> *Ibid.*



<sup>7</sup> Nurma Afrinda Prandansari, “*Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi*”, diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

[illegible]

Selain itu, berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2016 saja telah terhitung lebih dari 321.000 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia, di antaranya terdapat 1.657 kasus perkosaan, 268 kasus pelecehan, dan 1.064 kasus pencabulan. Sedangkan di ranah negara, telah terjadi 8 kasus pelanggaran.<sup>11</sup> Tidak sampai di situ saja, dalam kehidupan sosial masih sering dijumpai bentuk-bentuk sikap diskriminasi yang berdampak negatif terhadap perempuan di Indonesia.

<sup>11</sup> Prihandhini, “Tuntutan Perempuan Indonesia Di Women’s March Jakarta 2017”, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.

Misalnya melalui stigma tentang keperawanan dan perilaku seksualitas perempuan yang menghambat akses pendidikan.<sup>12</sup>

Selain itu, terdapat pula kasus diskriminasi yang diterima oleh buruh wanita. Pada umumnya, masih sering terjadi tindakan kekerasan ataupun eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh wanitanya. Padahal, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak maupun kebijakan yang seharusnya buruh wanita terima dari perusahaan mereka bekerja. Peraturan tersebut tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>13</sup> Selain itu, juga terdapat UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi ILO No. 111 yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 21 Tahun 1999 tentang Anti Diskriminasi Jabatan dan Pekerjaan, dan Konvensi ILO No. 100 yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 80 Tahun 1957 tentang Ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

Di dalam peraturan-peraturan tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban dari buruh wanita dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Akan tetapi pada kenyataannya, masih seringkali terjadi penyimpangan berupa kekerasan, pelecehan, hingga diskriminasi yang harus mereka terima.<sup>15</sup> Berangkat dari beberapa permasalahan isu yang melibatkan gender inilah yang

<sup>12</sup> Prihandhini, “*Tuntutan Perempuan Indonesia Di Women’s March Jakarta 2017*”, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.

<sup>13</sup> Annida Addiniaty, “*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita*”, diakses pada 17 Februari 2019, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Buruh%20Perempuan Nida REV.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Buruh%20Perempuan%20Nida_REV.pdf).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Dalam aksi protes tahun 2018 ini, para peserta aksi juga mengangkat 8 tuntutan, namun pada pelaksanaan *Women's March 2018* lebih berfokus terhadap isu kekerasan berbasis gender yang kerap kali terjadi di tengah kehidupan masyarakat, khususnya mendorong pengesahan RUU PKS, karena pada saat itu memang seperti itu kondisinya, berbeda dengan tahun 2017 yang lebih mengusung tema bhinneka tunggal ika, karena saat itu Indonesia sedang memanaskan terkait isu perselisihan antar suku.<sup>17</sup> Pada tahun 2018, peserta menuntut 8 tuntutan, yaitu: (1) tuntutan penghapusan hukum serta kebijakan yang dianggap diskriminatif dan melegalkan kekerasan yang berbasis gender; (2) tuntutan agar disahkannya hukum serta kebijakan yang pro terhadap perempuan, anak di bawah umur, masyarakat adat, kelompok difabel, kelompok minoritas lainnya dari diskriminasi dan kekerasan yang berbasis gender; (3) tuntutan agar disediakan akses keadilan dan pemulihan terhadap para korban kekerasan yang berbasis gender; (4) tuntutan agar

<sup>17</sup> Kate Walton, pesan e-mail kepada penulis, 5 Agustus 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai *Women's March* sebagai gerakan transnasional, karena mampu menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lainnya dan tidak terkecuali di Indonesia dengan terselenggaranya *Women's March Indonesia*. Selain itu, peneliti juga tertarik terhadap aktivisme *Women's March* yang merupakan suatu gerakan kolektif dari sekelompok masyarakat yang berfokus seputar isu-isu kekerasan, hak asasi manusia, penghapusan budaya patriarki, ketimpangan gender, dan lainnya. Di lain sisi, peneliti juga berasumsi bahwa hangatya isu gender dan tuntutan kebijakan kesetaraan gender di Indonesia memiliki keterkaitan dengan terselenggaranya *Women's March Indonesia*.

[illegible]





a) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa program studi Hubungan Internasional dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai isu gender dan kebijakan kesetaraan gender.

### b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan kajian mengenai isu gender dan kebijakan kesetaraan gender untuk saat ini maupun kedepannya, khususnya bagi kelompok akademisi maupun masyarakat.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian, yang kemudian berguna sebagai acuan dalam memperbanyak teori yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan pada penelitian kali ini. Setelah meninjau banyak referensi penelitian, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang serupa dengan judul yang ingin peneliti bahas kali ini. Peninjauan tersebut dilakukan agar penelitian kali ini dapat terhindar dari plagiasi dan memiliki nilai orisinalitas tersendiri. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan fokus topik kali ini:

Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Dia Puspitasari dengan

Kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Annida Addiniaty dengan judul **“Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita”**.<sup>20</sup> Jurnal ini membahas mengenai bagaimana buruh wanita masih terlalu sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi oleh perusahaannya, karena nyatanya hukum yang melindungi ruang gerak dan keamanan bagi buruh wanita masih terlalu minim sehingga masih sering kita jumpai di lapangan bahwa para kaum buruh wanita mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Sehingga membuat jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, Annida Addiniaty hanya mencoba untuk

<sup>20</sup> Annida Addiniaty, “*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita*”, diakses pada 17 Februari 2019, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Buruh%20Perempuan\\_Nida\\_REV.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Buruh%20Perempuan_Nida_REV.pdf).

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Wafa yang berjudul **“Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram Women’s March Indonesia 2018”**.<sup>21</sup> Pada Skripsi ini membahas mengenai analisis yang dilakukan oleh Wafa terhadap wacana kesetaraan gender yang diunggah pada akun Instagram *@womensmarchindo*, melalui ajakan berupa teks, lisan, maupun dalam bentuk praktik sosial budaya. Selain itu, pada Skripsi ini juga dibahas mengenai perbandingan antara wacana kesetaraan gender yang dimuat pada akun Instagram *@womensmarchindo* dengan konsep gender yang ada dalam agama Islam. Yang membedakan Skripsi yang ditulis oleh Wafa dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana Skripsi yang ditulis oleh Wafa membahas mengenai

[illegible]

<sup>22</sup> Puti Parameswari, “Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Detox Campaign on Fashion di Tiongkok”, Dauliyah Journal, Vol 1 No. 2, Agustus 2016.



## 1. Women's March

[illegible]

Pada pelaksanaannya, aksi unjuk rasa *Women's March* di  
oleh semua kalangan baik perempuan dan laki-laki dari  
belakang yang berbeda-beda.<sup>25</sup> Beberapa artis dan selebriti  
hadir dalam aksi protes saat itu, seperti bintang film Amerika  
Ashley Judd, Chloe Graze Moretz, Jessica Chastain, Ros  
Bella Thorne, penyanyi Cher, sutradara Michael Moore, s  
Chrissy teigen, hingga aktivis feminis Gloria Steinem.<sup>26</sup> M  
yang mereka lakukan saat itu, para pengunjuk rasa mengu  
bahwa mereka ingin menyampaikan kepada Presiden Ameri  
saat itu yakni Donald Trump pada hari pertamanya di Geo  
bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Selain

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Vina Muhtadi, “*Diaspora Indonesia Ikut dalam Women’s March*”, diakses pada 14 Mei 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/diaspora-ikut-dalam-womens-march/3687158.html>

<sup>26</sup> Eva Mazrieiva, "Protes 'Women's March' di Washington Guncang Dunia", diakses April 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-586721.html>.



### 3. Kesenjangan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana terciptanya perlakuan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan untuk menjadi manusia seutuhnya dan dapat menjalankan perannya dengan semestinya dalam kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, sosial

<sup>31</sup> *Ibid.*

# Pengaruh Women's March Indonesia terhadap kebijakan kesetaraan gender

Peneliti berasumsi bahwa *Women's March* yang mengusung konsep Feminisme Liberal mengupayakan agar perempuan mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi gerakan yang mengusung gerakan sosial transformatif yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang dan memperlakukan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Melalui beberapa aksi seperti aksi demonstrasi, pembuatan petisi, pengadaan *talk show* dan diskusi film, para aktivis mengangkat tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan masyarakat demi menciptakan keadaan dan kebijakan

<sup>32</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST-Press). Dalam Wewen Kusumi Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah),” *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 2, no. 1 (2016), <https://www.scribd.com/document/411082401/Analisis-Pengarusutamaan-Gender-dalam-Kebijakan-Publik>.

[illegible]



Pada penelitian ini, penulis akan membahasnya secara runtun dan rinci melalui lima bab yakni:

Pada bab pertama, penulis akan menjabarkan melalui latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, penelitian terdahulu, argumentasi utama, dan sistematika penulisan.

Pada bab ke-dua, penulis akan membahas mengenai pengertian dari feminisme liberal, gerakan sosial transformatif, dan kesetaraan gender.

Pada bab ke-tiga, penulis akan memaparkan terkait dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahap penelitian, subjek dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil temuan dan analisis data terkait gerakan *Women's March*, *Women's March*

## 5. BAB V: Penutup

Pada bab terakhir dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan terkait kesimpulan dari apa yang telah penulis peroleh melalui penelitian kali ini , selain itu juga terdapat saran yang diberikan setelah penelitian selesai dilakukan.



Untuk pengertian dari Feminisme Liberal, dapat dipahami sebagai salah satu aliran dalam perspektif Feminisme yang memiliki landasan terhadap kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Para pengikut dari aliran Feminisme Liberal ini percaya bahwa kelompok perempuan tidak ada bedanya dengan kelompok laki-laki, dalam hal ini mereka memiliki hak untuk mengembangkan potensi moralitas maupun intelektual dalam diri mereka. Dengan demikian, kelompok perempuan juga memiliki hak dalam ikut serta berperan di dalam kehidupan sosial, dan bukan sebagai kelompok terdiskriminasi yang ruang geraknya hanya disekitar lingkup rumah dan keluarga saja. Maka dari itu, pengikut dari Feminisme Liberal mengupayakan agar status perempuan di seluruh dunia dapat memiliki tempat yang sebaik-baiknya.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Yohanes Sulaiman dalam Irene Noviyanti Dewi, “*Feminisme Liberal*”, diakses pada 18 Maret 2019, [https://www.academia.edu/23133470/FEMINISME\\_LIBERAL](https://www.academia.edu/23133470/FEMINISME_LIBERAL).

### 3. Kesenjangan Gender

<sup>39</sup> Mansour Fakhil, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST-Press). Dalam Wewen Kusumi Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah),” *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 2, no. 1 (2016), <https://www.scribd.com/document/411082401/Analisis-Pengarusutamaan-Gender-dalam-Kebijakan-Publik>.

Ketika suatu individu memiliki akses dan partisipasi, berarti ia memiliki peluang maupun kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang ada dan juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara mengelola dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan secara penuh untuk pengambilan keputusan atas pengelolaan dan hasil sumber daya yang ada. Sehingga suatu individu dapat memperoleh manfaat pembangunan yang sama.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*





- 1) Koridor Coworking Space, Gedung Siola lantai 3, Jl. Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- 2) Perpustakaan Daerah, Jl. Menur Pumpungan No. 32, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani, No. 117, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- 4) Women's March, Surabaya & Jakarta.

Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan kepentingan dan keperluan peneliti yang cenderung melakukan pengumpulan data melalui referensi-referensi berupa buku, jurnal online, artikel, berita, dll. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Women's March di lokasi yang ditentukan oleh pihak Women's March Surabaya & Jakarta.

Penelitian ini dimulai sejak pengajuan judul dan bimbingan dengan dosen wali, kemudian dilakukannya seminar proposal, hingga proses penulisan penelitian dan bimbingan dengan dosen pembimbing, dan akhirnya dilakukannya sidang skripsi dalam rentang waktu bulan Maret-Juli tahun 2019.

Langkah awal yang peneliti lakukan adalah memilih topik dan judul yang nantinya akan diteliti. Setelah melakukan peninjauan lebih lanjut serta melakukan konsultasi dengan dosen wali, maka pada kesempatan kali ini peneliti memutuskan untuk memilih topik seputar “gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan kesetaraan gender di Indonesia” dan dengan judul “Pengaruh Gerakan Transnasional *Women’s March* Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia Pada Tahun 2017-2018”. Alasan dari pemilihan topik dan judul tersebut adalah dikarenakan dalam kehidupan sosial, masih sering kita jumpai terdapatnya budaya patriarki dalam masyarakat di berbagai aspek kehidupan, dan baru-baru ini telah diselenggarakannya aksi *Women’s March* di Indonesia sebagai bentuk respon dari sebagian besar masyarakat yang merasa gerah dengan berbagai macam isu permasalahan sosial berbasis gender, sehingga peneliti merasa hal tersebut sebagai fenomena yang menarik dan perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Pada tahap ini, peneliti selanjutnya memilih metode penelitian dan teori yang dirasa relevan dengan topik dan judul yang sebelumnya telah dipilih. Maka dari itu, peneliti merasa cocok menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hal ini dikarenakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan suatu



Unit analisa menurut Mochtar Mas' oed adalah suatu perilaku dari suatu individu, kelompok, negara, maupun sistem internasional yang akan dijelaskan, dideskripsikan ataupun diramalkan.<sup>45</sup> Fokus penelitian kali ini adalah Pengaruh Gerakan Transnasional *Women's March* Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018. Dengan demikian, unit analisis yang akan diteliti adalah aktivitas kelompok, yaitu *Women's March*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder.

Wawancara ataupun *interview* merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data untuk suatu penelitian dan menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti. Pada teknik wawancara, data diperoleh melalui mengajukan beberapa pertanyaan hingga bertatap

[illegible]

muka baik secara langsung maupun tidak langsung dengan orang yang ingin dijadikan sebagai narasumber.<sup>46</sup>

Wawancara bukan hanya sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan dalam bersosial, hal ini dikarenakan peran yang dapat kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan tersendiri bagi pelakunya. Hubungan yang terus menerus berlangsung dan memberikan kenikmatan, sehingga pelakunya akan terus berusaha untuk menguasainya. Karena efeknya dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan, maka dominasinya akan membangkitkan semangat untuk terus melakukan wawancara.<sup>47</sup>

Moleong memiliki definisi tersendiri untuk wawancara, yaitu suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) adalah orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan apapun yang telah diajukan.<sup>48</sup>

Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam adalah proses mendapatkan keterangan yang berguna pada tujuan penelitian dan cara dalam melakukan kegiatan tanya jawab adalah dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan terwawancara, dengan

<sup>46</sup> Juliansyah Noor,”*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia), 138.

<sup>47</sup> Benny dan Hughes dalam James A. Black dan Dean J. Champion, “*metode dan masalah penelitian sosial*”, (Bandung: Refika Aditama, 1999), 305.

<sup>48</sup> Moleong dalam Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial" (Jakarta: Salemba Humanika), 118.











Aksi protes akhirnya dilakukan setelah beberapa jam Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45. Dalam aksinya, aksi protes saat itu tidak hanya diwarnai oleh masyarakat biasa akan tetapi juga datang dari kalangan selebriti, antara lain aktivis feminis Gloria Steinem, penyanyi Cher, bintang film America Ferrera, Ashley Judd, Chloe Graze Moretz, Jessica Chastain, Bella Thorne,

[illegible]





Trump bahwa perempuan juga memiliki hak-hak yang patut mereka terima karena telah tertuang dalam hak asasi manusia.

Renne, salah satu demonstan yang berasal dari Charlotte, North Carolina menyatakan:

“saya berunjuk rasa demi putri saya dan generasi perempuan mendatang. Mengapa? Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tetap memiliki kesempatan yang sama dan bahwa saya berjuang demi mereka .... Kami ingin presiden Trump tahu bahwa kami tetap akan berjuang dan tidak akan mundur”.<sup>57</sup>

Selain isu mengenai hak-hak perempuan, dalam aksi protesnya mereka juga turut mengangkat isu kesetaraan gender dan ras, keterjangkauan layanan kesehatan, mendesak untuk segera diakhirinya kekerasan terhadap perempuan, terutama tentang isu kekerasan dalam rumah tangga dan isu pemerkosaan yang terjadi di lingkungan kampus, pemberian hak untuk melakukan aborsi, perlindungan bagi masyarakat difabel, perlindungan terhadap imigran dan komunitas LGBTQ, serta isu lingkungan hidup.<sup>58</sup>

Mary, datang ke lokasi penyelenggaraan *Women's March* bersama dengan teman-temannya kala itu mengatakan, “Ada begitu banyak perempuan di negara ini yang tahu bahwa mereka luar biasa. Mereka tahu bahwa kita harus bersatu dan saling melindungi, dan

<sup>57</sup> Eva Mazriea, “*Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia*”, diakses pada 29 April 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-dunia/3686721.html>.

<sup>58</sup> *Ibid.*



Suksesnya aksi *Women's March on Washington DC* kala itu tidak lepas dari peran empat inisiator perempuan, yakni Carmen Perez yang dalam kesehariannya berfokus pada isu-isu sosial menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan keadilan gender; Bob Bland yang berprofesi sebagai pengusaha muda dengan dobrakannya terhadap sistem industri busana di Amerika dengan memerhatikan aspek keadilan buruh, ramah lingkungan dan berkelanjutan; Tamika D.

[illegible]



Sumber: kumparan.com

[illegible]

Selain di Perancis, antusiasme masyarakat luas dalam ikut serta memeriahkan penyelenggaraan gerakan sosial *Women's March* juga terjadi di negara Australia, tepatnya para pengunjung rasa berkumpul dan melakukan aksi protes kala itu di sebuah taman yang cukup terkenal di kota Sydney. Selama event berlangsung, para pengunjung rasa membawa berbagai macam spanduk dan poster menarik dengan maksud yang bermacam-macam, antara lain "*Fight Like a Girl!*" dan "*Feminism is My Trump Card*". Selain itu, pihak penyelenggara aksi protes yang terjadi di Australia saat itu mengatakan, "isu kebencian berlatar ras, jenis kelamin dan agama ataupun kepercayaan bukan hanya masalah di Amerika Serikat saja".<sup>66</sup>

cukup terkenal di kota Sydney. Selama event berlangsung, pengunjung rasa membawa berbagai macam spanduk dan poster yang menarik dengan maksud yang bermacam-macam, antara lain “*Like a Girl*” dan “*Feminism is My Trump Card*”. Selain itu, penyelenggara aksi protes yang terjadi di Australia mengatakan, “isu kebencian berlatar ras, jenis kelamin dan agama ataupun kepercayaan bukan hanya masalah di Amerika Serikat”.

Hangatnya isu berbasis gender kala itu berhasil membangkitkan masyarakat global antusias untuk ikut serta berpartisipasi. Mereka merasakan euforia *Women’s March* yang awalnya dimulai di Washington DC dalam menyambut pelantikan Donald Trump.

<sup>66</sup> *Ibid.*



Di Indonesia, aksi dari *Women's March* ini pertama kalinya dilakukan di Jakarta, pada 4 Maret 2017 yang lalu. Salah satu titik dari aksi protes kala itu terjadi di Taman Pandang Istana, diikuti oleh kurang lebih 700 partisipan yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan komunitas masyarakat,<sup>69</sup> beberapa diantaranya adalah LBH, *PeaceWomen Across the Globe*, Solidaritas Perempuan Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia, yang dimaksudkan agar aksi dan kampanye yang nantinya dilakukan lebih luas dan memiliki massa yang cukup dalam mengupayakan tercapainya kesetaraan hak bagi perempuan dan kelompok minoritas.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Lisa Siregar, “*Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women*”, diakses pada 4 Juli 2019, <https://jakartaglobe.id/culture/activists-to-march-in-jakarta-to-demand-equal-rights-for-women/>.

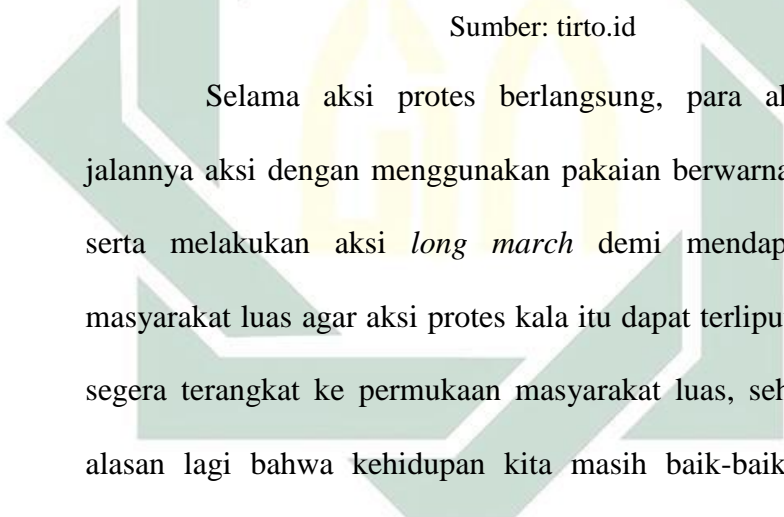


Selain itu, Aninindita Putri selaku pengurus WM Surabaya turut membenarkan bahwa penyelenggaraan *Women's March Indonesia* pada 2017 lalu merupakan adaptasi dari aksi protes *Women's March* di Washington DC. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, *Women's March Indonesia* tidak serta merta mengadaptasi mentah-mentah apa yang terdapat pada *Women's March Washington*. Anindita mengatakan, “kita memang mengambil dari Washington. Tapi kita terapkan sesuai dengan masalah apa yang ada di Indonesia. Waktu yang di Washington DC itu karena kebijakan Trump”.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Wawancara pribadi dengan Koordinator Kemitraan *Women's March Jakarta* 2018, Anindya Vivi Restuviani, Jakarta, 24 Juni 2019.

<sup>73</sup> Wawancara pribadi dengan Ketua Pelaksana *Women's March Surabaya*, Anindita Putri, Surabaya, 30 Maret 2019.





Sumber: tirto.id

Selama aksi protes berlangsung, para aktivis mewarnai jalannya aksi dengan menggunakan pakaian berwarna ungu dan pink, serta melakukan aksi *long march* demi mendapatkan perhatian masyarakat luas agar aksi protes kala itu dapat terliput oleh media dan segera terangkat ke permukaan masyarakat luas, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa kehidupan kita masih baik-baik saja, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa isu-isu sosial berbasis gender itu ada dan telah menjadi permasalahan sosial yang meresahkan dalam kehidupan kita selama ini.

Menurut Kate Walton, bahwa banyaknya peserta *Women's March* di Jakarta yang pada saat itu menggunakan atribut berwarna ungu dan pink dikarenakan memiliki makna simbolis tertentu. Ia mengatakan, “Warna pink dan ungu menjadi simbol WMJ 2017 karena



Selain itu, menurut Teta Ingkan Gahansyah selaku Wakil Ketua *Women's March Surabaya* 2018-2019 bahwa aksi demonstrasi pada *Women's March Jakarta* saat itu sengaja dilakukan untuk mengenalkan ke seluruh kalangan masyarakat bahwa gerakan perempuan itu ada. Ia mengatakan:

“sasaran utamanya sih yang pertama kita mau memperkenalkan gerakan perempuan ya dan tuntutan-tuntutan perempuan atau tuntutan kaum marginal yang ada di Indonesia ya. Jadi memang tujuannya ke semua masyarakat ya, baik itu ke perempuan, kaum-kaum marginal, juga ke masyarakat luas. Karena kita kan bersinergi langsung kan, ga mungkin kita mengedukasi kaum perempuan aja atau teman-teman marginal aja. Sedangkan masyarakat lain ga kita edukasi”.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua *Women's March Surabaya* 2018-2019, Teta Ingkan Gahansyah, Surabaya, 4 Agustus 2019.

Pada aksi kala itu, para aktivis yang berpartisipasi dalam *Women's March* mengangkat 8 tuntutan kepada pemerintah dan juga masyarakat Indonesia.<sup>80</sup>



Gambar 4.6. Tuntutan Women's March Indonesia

Sumber: womantalk.com

Pada tahun 2017, *Women's March Indonesia* memiliki salah satu tuntutan terkait pengesahan RUU Penghapusan Seksual, yang pada saat itu merupakan suatu isu yang juga cukup serius dan perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Menanggapi isu kala itu, Teta Ingkan Gahansyah selaku Wakil Ketua *Women's March Surabaya* 2018-2019 mengiyakan bahwa RUU tersebut sangat penting perannya. Ia mengatakan:

“karena ya memang banyak banget kalo Undang-Undang yang sekarang kita lihat, memang ada yang beberapa masih belum pro sama korban. Sama kaya pembinaan langsung

<sup>80</sup> Prihandhini, “*Tuntutan Perempuan Indonesia Di Women’s March Jakarta 2017*”, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.



Pada saat itu, para aktivis mendesak pemerintah agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini untuk segera disahkan, mengingat bahwa RUU ini sangatlah krusial dikarenakan hukum yang berlaku di Indonesia untuk saat itu belum memiliki perlindungan yang cukup untuk melindungi kaum perempuan dari kekerasan.

<sup>81</sup> Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua *Women's March Surabaya* 2018-2019, Teta Ingkan Gahansyah, Surabaya, 4 Agustus 2019.

<sup>82</sup> Restu Dianti Putri, “RUU PKS: Dijinakkan Pemerintah, Lamaban di DPR”, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://tirto.id/ruu-pks-dijinakkan-pemerintah-lamban-di-dpr-cAzn>.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Alasan lain mengapa para aktivis sangat menginginkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini disahkan adalah karena pada saat itu tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sangatlah memprihatinkan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2016, terhitung lebih dari 321.000 kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia, di antaranya 1.657 kasus perkosaan, 268 kasus pelecehan, dan 1.064 kasus pencabulan. Sedangkan di ranah negara, telah terjadi 8 kasus pelanggaran.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Prihandhini, “*Tuntutan Perempuan Indonesia Di Women’s March Jakarta 2017*”, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.

[illegible]

maka Women's March melayangkan tuntutan nya kepada pemerintah Indonesia dan juga masyarakat.

Pada saat aksi protes *Women's March Indonesia* tahun 2017 berlangsung juga turut membawa tuntutan dukungan terhadap hak komunitas *transgender* di Indonesia. Hal ini diangkat dengan maksud agar semua lapisan masyarakat segera berhenti untuk memperlakukan kaum perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya secara diskriminatif ataupun malah menjadikan mereka sebagai sasaran utama dalam melangsungkan tindakan kekerasan, mengingat bahwa berdasarkan data yang ditemukan dari Arus Pelangi, KSM dan PLUSH di tahun 2013 saja terdapat 89,3 persen tindak kekerasan terhadap kelompok LGBT.<sup>87</sup>

Selain itu, berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2015 tercatat bahwa terdapat 110 kasus kekerasan dan perlakuan diskriminasi yang dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia.<sup>88</sup>

Bentuk diskriminasi yang diterima oleh kelompok LGBT tidak berhenti sampai disitu saja. Hal ini dapat kita lihat melalui ujaran kebencian yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 23 Februari 2016 yang lalu, ia mengatakan bahwa LGBT adalah suatu *proxy war* yang dampaknya lebih membahayakan

<sup>87</sup> Tunggul Pawestri, “Menghentikan Kebencian dan Kekerasan Terhadap LGBT”, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://www.dw.com/id/menghentikan-kebencian-dan-kekerasan-terhadap-lgbt/a-19515331-0>.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Pada aksi *Women's March Indonesia* tahun 2017 berlangsung, tidak sedikit poster yang bertuliskan mengenai keinginan perempuan untuk tidak diatur tubuhnya. Beberapa poster tersebut

<sup>90</sup> *Ibid.*

diantaranya bertuliskan “*jangan atur tubuhku*”, hal ini turut berkaitan karena pada saat itu otonomi tubuh juga merupakan salah satu tema tuntutan utama yang sedang diangkat pada aksi demonstrasi.

Menurut Teta Ingkan Gahansyah selaku Wakil Ketua Women's March Surabaya 2018-2019, pemilihan isu otonomi tubuh oleh peserta demonstrasi ditujukan kepada masyarakat bahwa tubuh dari seorang perempuan bukanlah urusan umum. Ia mengatakan:

“jadi kebanyakan kasus pemerkosaan terhadap perempuan itu kan memang yang disalahkan adalah si korban .... Karena pake bajunya apasih .... Jadi kesannya kaya perempuan itu ga bisa bebas berpakaian”.<sup>91</sup>



Gambar 4.7. Screenshot aksi massa Women's March 2017

Sumber: akun instagram @womensmarchjkt

<sup>91</sup> Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua *Women's March Surabaya* 2018-2019, Teta Ingkan Gahansyah, Surabaya, 4 Agustus 2019.

Seperti yang kita ketahui bahwa pelecehan seksual masih sering kali dianggap sebagai isu yang tidak penting oleh masyarakat Indonesia. Padahal sebenarnya otonomi tubuh dengan pelecehan seksual adalah dua hal yang memiliki keterkaitan sangat erat, hal ini disebabkan karena pelecehan seksual adalah tindakan yang sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan sering kali membuat kaum perempuan tidak merasa aman dan nyaman untuk berada di ruang publik. Hal ini dikarenakan karena pelecehan seksual dapat menyebabkan korban tanpa sadar melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, seperti apa yang biasanya dilakukan seseorang dalam menilai benda, sehingga kondisi ini membuat korban menganggap dirinya adalah sebuah objek dan bukanlah sebagai seorang manusia. Hal ini juga berlaku pada kaum pria dimana kondisi membuat mereka turut menjadikan kaum perempuan sebagai objek. Berdasarkan hal

[illegible]



“Berdasarkan jumlah peserta yang datang atas keinginan sendiri, artinya tidak ada yang dibayar atau diberi nasi box untuk memicu ketertarikannya, serta jumlah organisasi dan komunitas yang ikut terlibat aktif dalam aksinya. Kebanyakan peserta tidak pernah mengikuti aksi sebelumnya dan malah sama sekali tidak terlibat dalam gerakan apapun, maka bisa dikatakan sukses dari aspek peningkatan kesadaran. Liputan media juga cukup besar dan mengangkat beberapa topik dan desakan penting”.<sup>93</sup>

Menyambut tingginya antusiasme beberapa masyarakat dalam menghadapi isu berbasis gender dan ikut serta berpartisipasi dalam gerakan-gerakan perjuangan keadilan gender membuat pengurus *Women's March Jakarta* kala itu, melalui *Jakarta Feminist Discussion*

[illegible]



Tidak berhenti hanya di tahun 2017 saja, setahun kemudian aksi *Women's March Indonesia* kembali diselenggarakan, tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 2018, massa pada aksi *Women's March Jakarta* kala itu berkumpul di Taman Aspirasi di seberang Istana Negara. Pada tahun 2018 ini, menariknya aksi protes *Women's March Indonesia* tidak hanya diselenggarakan di satu titik Ibu Kota Jakarta saja, melainkan juga diselenggarakan di 12 kota lainnya, yaitu Bandung, Surabaya, Malang, Salatiga, Yogyakarta, Serang, Denpasar, Lampung, Kupang, Pontianak, Sumba, dan Tondano.<sup>94</sup>

<sup>94</sup> “Women’s March Dalam Jepletan Kamera”, Voxpop Indonesia, diakses pada 10 Mei 2018, <https://voxpath.id/womens-march-2018/>.

Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) dan Yayasan Bantuan Hukum Perempuan (LBH Apik).<sup>95</sup>

Kerri Na Basaria, yang merupakan ketua penyelenggaraan *Women's March Jakarta 2018* berkata, “WMJ tahun lalu adalah pengingat bahwa demonstrasi seperti ini diperlukan selama ketidakadilan terus ada, terutama terhadap perempuan, kelompok minoritas dan marginal. Itulah sebabnya kami membahas masalah kekerasan berbasis gender pada tahun 2018”.<sup>96</sup>



Gambar 4.8. Screenshot tuntutan Women's March 2018

Sumber: akun instagram @womensmarchindo

Pada aksi Women's March tahun 2018 ini, tuntutan yang diangkat oleh para pengunjung rasa lebih fokus terhadap isu berbasis

<sup>95</sup> Dhania Sarahtika, “*The Women Behind Women’s March Jakarta*”, diakses pada 28 Mei 2019, <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Suksesnya aksi *Women's March* di Indonesia tahun 2017-2018 tidak lepas dari peran orang-orang hebat di belakang layar. Berikut ini adalah profil dari beberapa orang-orang yang memiliki peran penting terhadap terselenggaranya *Women's March* di Indonesia tahun 2017-2018:

Kerri Na Basaria adalah seorang eksekutif pemasaran di suatu perusahaan properti. Ia merupakan lulusan program studi Sejarah di University of Sydney dan University of St. Andrews. Ia mulai ikut terlibat sebagai aktivis seputar hak-hak perempuan ketika dia menjadi sukarelawan pada *Women's March Jakarta*

[illegible]

## 2. Naila Rizqi Zakiah

### 3. Anindya Vivi Restuviani

<sup>98</sup> Dhania Sarahtika, “*The Women Behind Women’s March Jakarta*”, diakses pada 28 Mei 2019, <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>.

[illegible]

#### 4. Emily Lawsen

## 5. Kate Walton

<sup>100</sup> Dhanika Sarahtika, “The Women Behind Women’s March Jakarta”, diakses pada 28 Mei 2019, <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>.

[illegible]









Tidak hanya itu saja, kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja dan buruh wanita terus bermunculan. Berdasarkan laporan pada siaran pers BNP2TKI Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun 2013-2018 telah terjadi sebanyak 192 kasus buruh migran perempuan asal NTT yang meninggal dunia. Selain itu juga terdapat fakta bahwa mereka rawan akan terjatuh ke tangan sindikat perdagangan manusia (*Human Trafficking*).<sup>108</sup> Dengan demikian, aksi *Women's March Jakarta 2017* kala itu turut dimanfaatkan oleh para pengunjung dalam mengangkat isu-isu kekerasan terhadap pekerja dan buruh wanita yang selama ini masih menjadi polemik dan tak kunjung selesai, sekaligus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuat kebijakan yang melindungi lingkungan hidup dan kerja PRT maupun buruh wanita berbasis HAM.

Desakan dan aksi protes pengunjung rasa dalam menuntut diwujudkannya perlindungan terhadap buruh migran berbasis HAM dan kesetaraan gender pada *Women's March Jakarta 2017* tidaklah sia-sia. Setelah melalui proses revisi yang panjang, kurang lebih

<sup>108</sup> Nurma Afrinda Prandansari, "Women's March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi", diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

Pada UU No. 18 Tahun 2017 terdapat poin-poin yang diantaranya mengenai: (1) jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini dikarenakan bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijamin penegakannya; (2) Pekerja Migran Indonesia mendapatkan perlindungan dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lainnya yang tidak sesuai

<sup>110</sup> Kate Walton, pesan e-mail kepada penulis, 5 Agustus 2019.

[illegible]

Apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan pada beberapa aspek. Aspek tersebut di antaranya adalah mengenai perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, yang juga oleh Pemerintah Indonesia telah diratifikasi ke dalam UU No. 6 Tahun 2012. Meskipun begitu, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam UU No. 18 Tahun 2017 terkait dengan tatanan implementasi hingga aturan pelaksanaannya ke depan.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Sekretariat Migrant care, “Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia”, diakses pada 9 Juli 2019, <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

[illegible]

Masalah belum berakhir, perjuangan belum selesai, pada tahun 2018 *Women's March Indonesia* kembali diselenggarakan di Jakarta dan 12 kota lainnya, yaitu Bandung, Surabaya, Malang, Salatiga, Yogyakarta, Serang, Denpasar, Lampung, Kupang, Pontianak, Sumba, dan Tondano.<sup>115</sup>

1. Penghapusan hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan mengganggu kekerasan berbasis gender.
2. Pengesahan hukum yang melindungi perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok difabel, kelompok minoritas gender dan seksual dari kekerasan berbasis gender.
3. Penyediaan akses keadilan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
4. Penghentian intervensi negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga negara.
5. penghapusan stigma dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas dan status kesehatan.
6. Penghapusan praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hidup, pendidikan dan pekerjaan.

<sup>115</sup> “Women’s March Dalam Jeperatan Kamera”, Voxpop Indonesia, diakses pada 10 Mei 2018, <https://voxpoppop.id/womens-march-2018/>.





Sumber: akun Instagram @purnaningtuwuh

[illegible]



Untuk pendanaan, pihak penyelenggara *Women's March Indonesia* memperolehnya melalui usaha-usaha mandiri yang mereka lakukan. Dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya, pastinya para aktivis membutuhkan dana demi kelancaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, terlebih lagi melalui *Women's March Indonesia* mereka tidaklah ditunggangi kelompok kepentingan tertentu sehingga dalam pendanaan mereka harus mencari sendiri. Usaha tersebut dilakukan dengan menjual merchandise seperti tumbler, pouch, dan kaos bertema *Women's March* untuk memperoleh penghasilan dan digunakan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, apabila terdapat masyarakat yang ingin menyumbang, mereka akan sangat terbuka untuk hal itu.<sup>118</sup>

<sup>118</sup> Wawancara pribadi dengan Pengurus *Women's March Surabaya*, Teta Ingran Gahansyah, Surabaya, 30 Maret 2019.

Dalam mendesak pemerintah, *Women's March Indonesia* melakukan berbagai macam cara demi mencapai tujuannya. Selain melakukan aksi protes melalui *event Women's March Indonesia* yang diselenggarakan setahun sekali. Para aktivis juga menyelenggarakan kegiatan Pra-WM seperti *talk show*, bedah film, diskusi, edukasi dan

[illegible]

“Gerakan ini lahir langsung dari inisiatif masyarakat sipil. Gerakan era digital, yang merupakan sebuah gerakan baru .... Pengaruhnya adalah sosialisasi yang lebih luas ke publik, terutama masyarakat muda yang banyak menggunakan teknologi komunikasi dan informasi ... sebagai gerakan perempuan baru di era digital, kontribusinya penting. Sebab gerakan perempuan sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda.”<sup>121</sup>

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa *Women's March* merupakan suatu Gerakan Transnasional. Hal ini dapat dilihat melalui gerakan *Women's March* yang pada awalnya merupakan gerakan kolektif dari masyarakat Amerika Serikat dalam merespon pelantikan Donald Trump sebagai Presiden

<sup>121</sup> Mariana Amiruddin, pesan e-mail kepada peneliti, 8 Agustus 2019.

Selain di Perancis, gerakan sosial *Women's March* juga terjadi di negara Indonesia. Di Indonesia, aksi protes serupa turut terjadi yang ditandai dengan diselenggarakannya *Women's March Indonesia* untuk pertama kalinya pada 4 Maret 2017 yang lalu di Jakarta.

Berdasarkan efek domino yang diberikan dari terselenggaranya *Women's march* secara global, menjadikan gerakan ini sebagai suatu Gerakan Transnasional. Hal ini dikarenakan *Women' March* sesuai dengan definisi dari sebuah Gerakan Transnasional yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu suatu upaya dari kelompok-kelompok dan penganut

[illegible]

Selain itu, dengan diselenggarakannya aksi *Women's March Indonesia* yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok yang berfokus pada isu perempuan dan diskriminasi berbasis gender, membuat gerakan ini sesuai dengan perspektif dalam teori Feminisme Liberal. Para aktivis menghadirkan sebuah wadah bagi siapa saja yang ingin menyuarakan tuntutan mereka terhadap pemerintah dan juga masyarakat terkait isu-isu perempuan, isu kekerasan berbasis gender dan kelompok marginal lainnya.

<sup>123</sup> Jorg Balsiger, “Transnational Social Movement”, diakses pada 11 Juni 2019, <https://www.britannica.com/topic/transnational-social-movement>.

[illegible]

Selanjutnya mengenai *Women's March Indonesia* yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2017-2018. Hal ini dikarenakan *Women's March* turut memiliki andil dalam mendesak pemerintah dan mendukung LSM dalam hal advokasi terhadap menghadirkan kebijakan kesetaraan gender melalui aksi-aksi tuntutan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para aktivis dengan melakukan *march*, membuat petisi, serta desakan-desakan lainnya yang dilakukan sebagai aksi lanjutan setelah kegiatan *Women's March Jakarta 2017*.

<sup>125</sup> A. Nugraha, “*Gerakan Sosial*”, Diakses pada 26 Maret 2019, [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14715/2/T1\\_352011603\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14715/2/T1_352011603_BAB%20II.pdf).



Selain itu, pada aksi *Women's March Indonesia 2018* juga turut berperan dalam mendesak pemerintah hingga disahkannya PERMA No.5 Tahun 2018 tentang tata cara melakukan tindak pidana terhadap korban kekerasan seksual.<sup>127</sup> Dimana melalui PERMA No. 5 Tahun 2018, tidak akan ada lagi pertanyaan maupun tindakan yang menyalahkan dan menyudutkan korban kekerasan seksual selama acara pidana dilakukan. hal ini Berkaitan dengan pertanyaan hakim kepada korban yang berbunyi “selama diperkosa kamu juga nikmatin ya?”, “kamu suka ya?”, ataupun “kamu diperkosa kenapa ga melawan?”.<sup>128</sup> Hal tersebut sangat

<sup>128</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan perspektif gender, sehingga dengan disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2018 dipastikan tidak akan ada lagi aksi menyalahkan maupun menyudutkan korban kekerasan seksual tanpa memandang korban berdasarkan jenis kelaminnya. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender karena dalam perlindungannya tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya, sehingga menciptakan kondisi yang berkeadilan gender dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini bahwa *Women's March* yang mengusung konsep Feminisme Liberal mengupayakan agar perempuan mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi gerakan yang mengusung gerakan sosial transformatif yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang dan memperlakukan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Dalam menjalankan aksinya, para aktivis mengangkat tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan masyarakat demi menciptakan keadaan dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, kondisi dimana laki-laki maupun perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dapat tercapai, sehingga kesetaraan gender dalam kehidupan sosial pada akhirnya dapat terealisasi.

## PENUTUP

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana *Women's March* berperan sebagai Gerakan Transnasional dan mempengaruhi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2017-2018. *Women's March* berhasil menjadi Gerakan Transnasional setelah tidak hanya terjadi di Washington DC saja, besarnya antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan *Women's March* kala itu berhasil menjadikannya sebagai gerakan massa terbesar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kesuksesan tersebut lalu memberikan efek domino kepada negara-negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui terselenggaranya aksi protes serupa di beberapa negara seperti Perancis, Australia, Republik Ceko, Inggris, Myanmar, dan juga Indonesia.

Di Indonesia, Women's March berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap pemerintah untuk segera merespon berbagai permasalahan sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan lainnya, sekaligus menjadi support system terhadap LSM-LSM dalam hal advokasi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Aksi protes diawali dengan diselenggarakannya *Women's March Jakarta 2017* dengan jumlah total partisipan kurang lebih sebanyak 700 orang. Aksi protes kala itu mengangkat 8 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan juga

masyarakat Indonesia. Pada praktiknya, salah satu tuntutan yang diangkat oleh *Women's March Indonesia* adalah mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan sebuah kebijakan yang melindungi Pekerja Migran Indonesia, melalui aksi demonstrasi, pembuatan petisi dan mendukung LSM dalam hal advokasi khususnya dukungan terhadap Organisasi Pekerja Migran. Pada akhirnya desakan yang terus dilakukan oleh aktivis akhirnya membuahkan hasil dengan pengesahan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berselang satu tahun. *Women's March Indonesia 2018* kembali digelar. Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi kala itu juga diselenggarakan di 12 kota lainnya, yaitu Bandung, Surabaya, Malang, Salatiga, Yogyakarta, Serang, Denpasar, Lampung, Kupang, Pontianak, Sumba, dan Tondano. Membawa 8 tuntutan dengan lebih berfokus terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, para aktivis kembali mendesak kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender di segala aspek kehidupan dan menghadirkan peraturan yang mendukung kesetaraan gender, serta kembali mendukung LSM-LSM dalam hal advokasi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan pemerintah. Pada akhirnya turut memberikan hasil dengan disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2018 tentang tata cara melakukan acara pidana terhadap korban kekerasan seksual.

1. Untuk *Women's March Indonesia*

## 2. Untuk Pemerintah

[illegible]

### 3. Untuk masyarakat Indonesia

Budaya patriarki harusnya dihapuskan, masyarakat harusnya lebih sadar bahwa budaya tersebut merupakan budaya yang memiliki dampak negatif. Perempuan bukanlah kaum terkecualikan, mereka punya hak untuk hidup bahagia sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Begitupun dengan bentuk-bentuk diskriminasi lain yang dialami oleh perempuan, mayoritas masyarakat masing-masing sering mewajarkan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena dianggap sudah biasa dilakukan.

4. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti merasa bahwa hasil penelitian ini masih lemah pada triangulasi data dari sisi pemerintah karena terkendala respon dan keterbatasan waktu penelitian. Maka dari itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih mengkaji data dari sisi pemerintah.











diakses pada 8 Agustus 2019. <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.

diakses pada 8 Agustus 2019. <https://www.dw.com/id/menghentikan-kebencian-dan-kekerasan-terhadap-lgbt/a-19515331-0>.

pada 26 Maret 2019. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsbdcee9dd19full.pdf>.

2019. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>.

Sarahtika, Dhania. “*The Women Behind Women’s March Jakarta*”. diakses pada 28 Mei 2019. <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>.

*Pelindungan Pekerja migran Indonesia*”. diakses pada 9 Juli 2019.  
<http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

- Suwardi, Anna Christi. "*Belajar Dari Gerakan Women's March Washington*". diakses pada 14 Mei 2018. <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/>.
- Suwastini, Ni Komang Arie. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No.1.
- Siregar, Lisa. "*Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women*". diakses pada 4 Juli 2019. <https://jakartaglobe.id/culture/activists-to-march-in-jakarta-to-demand-equal-rights-for-women/>.
- UCAN Indonesia . "*Women's March 2018 Tekankan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*". diakses pada 8 Agustus 2019. <https://indonesia.ucanews.com/2018/03/06/womens-march-2018-tekankan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan/>.
- Voxpop Indonesia. "*Women's March Dalam Jepletan Kamera*". diakses pada 10 Mei 2018. <http://voxpath.id/womens-march-2018/>.
- Wulandari, Rahma. "*Perjalanan Munira Ahmed, Dari Women's March Hingga Perlawanan Terhadap Politik Identitas*". diakses pada 10 Mei 2018. <https://www.femina.co.id/trending-topic/perjalanan-munira-ahmed-dari-women-s-march-hingga-perlawanan-terhadap-politik-identitas>.
- Wafa. "*Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram Women's March Indonesia 2018*". diakses pada 17 Maret 2019. [repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42746/1/WAFA-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42746/1/WAFA-FDK.pdf).